RENCANA
STRATEGIS

KECAMATAN PANGKALBALAM KOTA PANGKALPINANG

Pangkalpinang kota beribu senyuman

TAHUN 2024 - 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahuwata'ala karena atas limpahan rahmat Nya, Rencana Strategis Perubahan Kedua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) khususnya Kecamatan Pangkalbalam dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Derah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya menjadi Dasar Penyusunan Renstra SKPD yang mengacu pada RPJM Daerah yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang ditetapkan satu tahun sekali.

Selain itu sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru, menjadi dasar bagi Pemerintah Kota Pangkalpinang untuk menyusun Rencana Pembangunan Daerah selama tahun 2024-2026. maka penetapan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026. Renstra Kecamatan Pangkalbalam tahun 2024-2026 merupakan agenda kerja dari pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Pangkalbalam dalam kurun waktu tiga tahun kedepan. Renstra merupakan landasan penetapan kebijakan bagi pemerintah Kecamatan Pangkalbalam dengan memperhatikan perkembangan dinamika serta peluang perkembangan tantangan di masa mendatang.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan Pangkalbalam guna pencapaian keberhasilan, sangatlah ditentukan bagaimana perencaanaan strategis disusun sesuai tingkat analisa potensi sumber daya yang dimiliki maupun hasil analisa permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi dalam tiga tahun kedepan. Untuk itu Renstra Kecamatan Pangkalbalam 2024-2026 memegang peran penting bagi Kecamatan dalam menetapkan langkah kebijakan sesuai dengan perkembangan masa depan yang dihadapi.

Demikian juga terhadap tantangan dan hambatan harus menjadi bahan intropeksi terhadap kebijakan, sehingga dapat menjadi masukan yang berharga di masa yang akan datang.

Kami menyadari bahwa dalam penyempurnaan Renstra ini masih banyak kekurangannya, hal ini disebabkan keterbatasan yang ada pada kami, untuk itu kami menyampaikan permohonan maaf kepada semua pihak, dengan harapan nantinya Renstra ini dapat berguna, khususnya bagi Pemerintah Kecamatan Pangkalbalam dan Pemerintah Kota Pangkalpinang serta masyarakat umumnya di masa mendatang.

Pangkalpinang, April 2023

CAMAT PANGKALBALAM

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG KECAMATAN PANGKALBALAM

PURNAMAWAN, SE

NIP. 196905031993031007

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL iv
BAB I PENDAHULUAN I-1
1.1. Latar Belakang..... I-1
1.2. Landasan Hukum I-2
1.3. Maksud dan Tujuan..... I-5
1.4. Sistematika Penulisan I-6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PANGKALBALAM II-1
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah II-1
2.2. Uraian Tugas II-3
2.3. Sumber Daya Kecamatan Pangkalbalam..... II-10
2.4. Kinerja Pelayanan Kecamatan Pangkalbalam II-12
2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Pangkalbalam II-22

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN PANGKALBALAM… III-1
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Pangkalbalam… III-1
3.2. Telaah Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 ..... III-1
3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi (Bagi Kabupaten/Kota) III-6
3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis III-6
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis III-6

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN… IV-1
4.1 Tujuan Kecamatan Pangkalbalam IV-1

4.2 Sasaran Kecamatan Pangkalbalam IV-1

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN... ..... V-1
5.1 Strategi V-1
5.2 Arah Kebijakan V-1

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN... ..... VI-1
6.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota..... VI-1
6.2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik VI-2
6.3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan VI-3
6.4 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum VI-4
6.5 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum VI-4

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN..... VII-1
7.1 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan VII-1

BAB VIII PENUTUP.....VIII-1

Tabel 2.3.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kecamatan Pangkalbalam.. ..... II-11
Tabel 2.3.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di Kecamatan Pangkalbalam II-11
Tabel 2.3.3 Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Seluruh Wilayah Kecamatan Pangkalbalam II-12
Tabel 2.4.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pangkabalam Tahun 2021-2022 II-13
Tabel 2.4.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Pangkalbalam Tahun 2021-2022..... II-16
Tabel 3.2.1 Tabel Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang Beserta Indikator Tahun 2024-2026 ..... III-1
Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Pangkalbalam Terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah III-3
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Pangkalbalam.. IV-2
Tabel 5.1 Strategi dan Kebijakan Kecamatan Pangkalbalam V-3
Tabel 6.1(a) Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Pangkalbalam Tahun 2024-2026 ..... VI-5
Tabel 6.1(b) Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah sampai tingkat kelurahan di Kecamatan Pangkalbalam Tahun 2024-2026..... VI-15
Tabel 7 Indikator Kinerja Pelayanan Urusan Kecamatan Pangkalbalam VII-2
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Kecamatan Pangkalbalam yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2018-2023 ..... VII-3

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru, merupakan dasar dari penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 sebagai acuan dalam mendukung penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 didasarkan pada visi misi RPJPD Kota Pangkalpinang.

Sebagai implementasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta mendukung capaian tujuan dan sasaran Kota Pangkalpinang, maka Kecamatan Pangkalbalam perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan beberapa kebijakan Pemerintah Daerah agar dapat menjadi acuan bagi OPD dalam menyusun dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 3 (tiga) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023 dan bersifat indikatif.

Selama masa transisi pemerintahan di tahun 2024-2026, dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD). Penyusunan dokumen RPD dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), sedangkan penyusunan Renstra SKPD disusun oleh SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Renstra Kecamatan Pangkalbalam menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pangkalbalam untuk Tahun 2024-2026. Selain itu Renstra Kecamatan Pangkalbalam menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan

pada Kecamatan Pangkalbalam baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja

Tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Pangkalbalam adalah sebagai berikut:

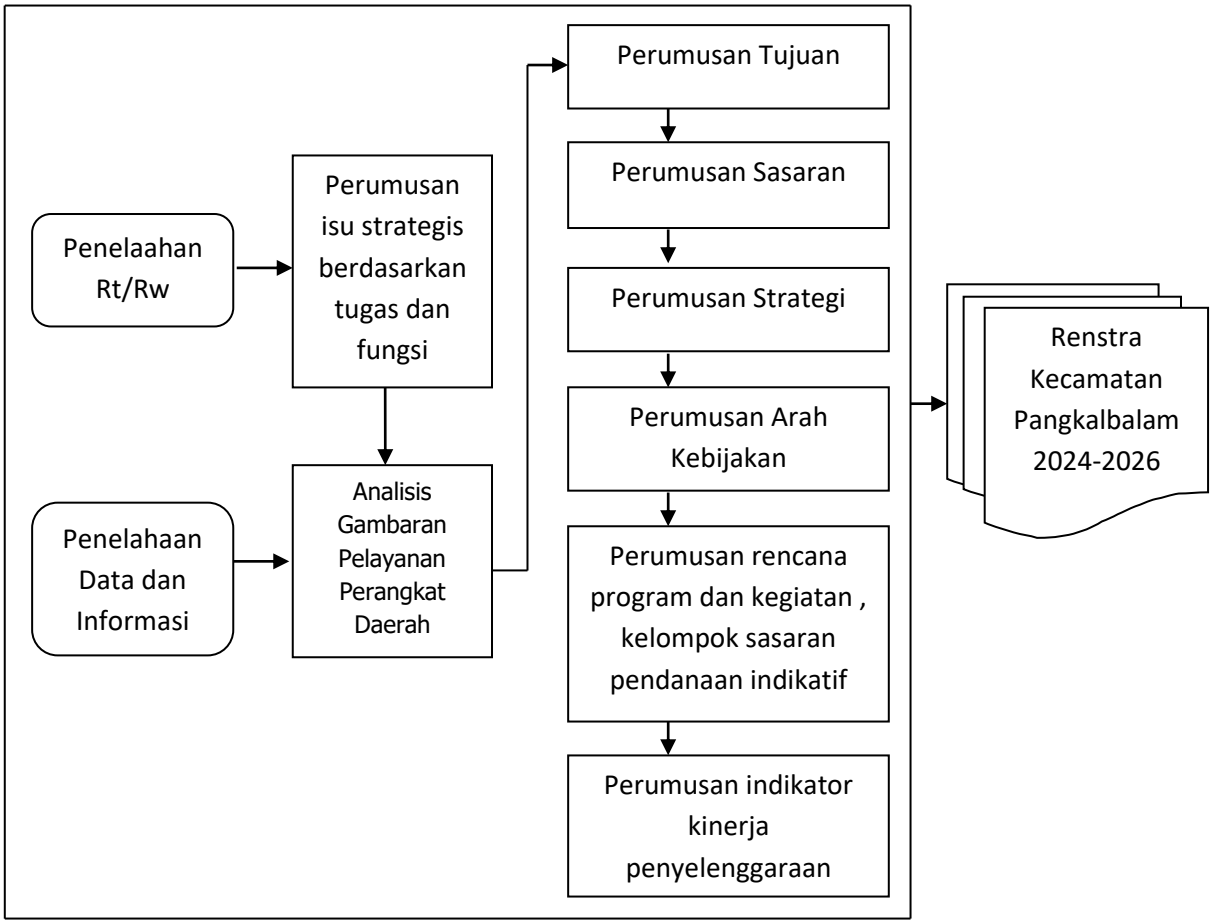

Gambar 1.1 Diagram Alir Tahapan Penyusunan Renstra Kecamatan Pangkalbalam

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Pangkalbalam Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia) Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk kotapraja dalam lingkungan daerah tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2OO8 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
15. Keputusan Menteri dalam Negeri nomor 050.5889 Tahun 2021 tentang HasiL Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan daerah Otonom baru;

17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
18. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 11 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pangkalinang Tahun 2007-2025 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 08, Seri E Nomor 04);
20. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2012 Nomor 01);
21. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18);
22. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 54);
23. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan dalam Wilayah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 58);
24. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021 Nomor 51);
25. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 144);
26. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 148).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pangkalbalam adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu tiga tahun sebagai penjabaran dari RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pangkalbalam

1.3.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang yaitu:

1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan urusan pemerintahan umum selama kurun waktu tahun 2024-2026 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pangkalbalam dalam mendukung tujuan dan sasaran Pembangunan kota Pangkalpinang.
2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kewilayahan kurun waktu tahun 2024-2026 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pada Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang
3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Kecamatan Pangkalbalam dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pangkalbalam yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2024-2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Pangkalbalam adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Pangkalbalam tahun 2024-2026.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Kecamatan

Pangkalbalam, sumber daya, kinerja pelayanan, kelompok sasaran layanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Penentuan Isu-isu Strategis yang ada di Pemerintah Kota Pangkalpinang.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran perangkat daerah berdasarkan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026.

Bab V Strategi dan Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah tahun 2024-2026.

Bab VI Rencana Program, Kegiatan dan sub kegiatan serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang tahun 2024-2026.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK), IKK Outcome.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PANGKALBALAM

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Pangkalbalam

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kota pangkalpinang dan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi ,Tugas dan Fungsi Serta tata kerja Kecamatan dan Kelurahan dalam wilayah kota Pangkalpinang Susunan Organisasi Kecamatan Pangkalbalam terdiri dari :

a. Camat Esselon III/a
b. Sekretaris Kecamatan esselon IV/a
    a. Sub Bag Umum dan Kepegawaian eselon IV/b
    b. Sub Bag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dan keuangan eselon IV/b
c. Kasi Tata Pemerintahan , Ketentraman dan Ketertiban Umum Esselon IV/a
d. Kasi Pembangunan Esselon IV/a
e. Kasi Pemberdayaan Masyarakat Esselon IV/a
f. Kasi Pelayanan Umum Esselon IV/a

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

KANTOR KECAMATAN PANGKALBALAM KOTA PANGKALPINANG, 31 DESEMBER 2022

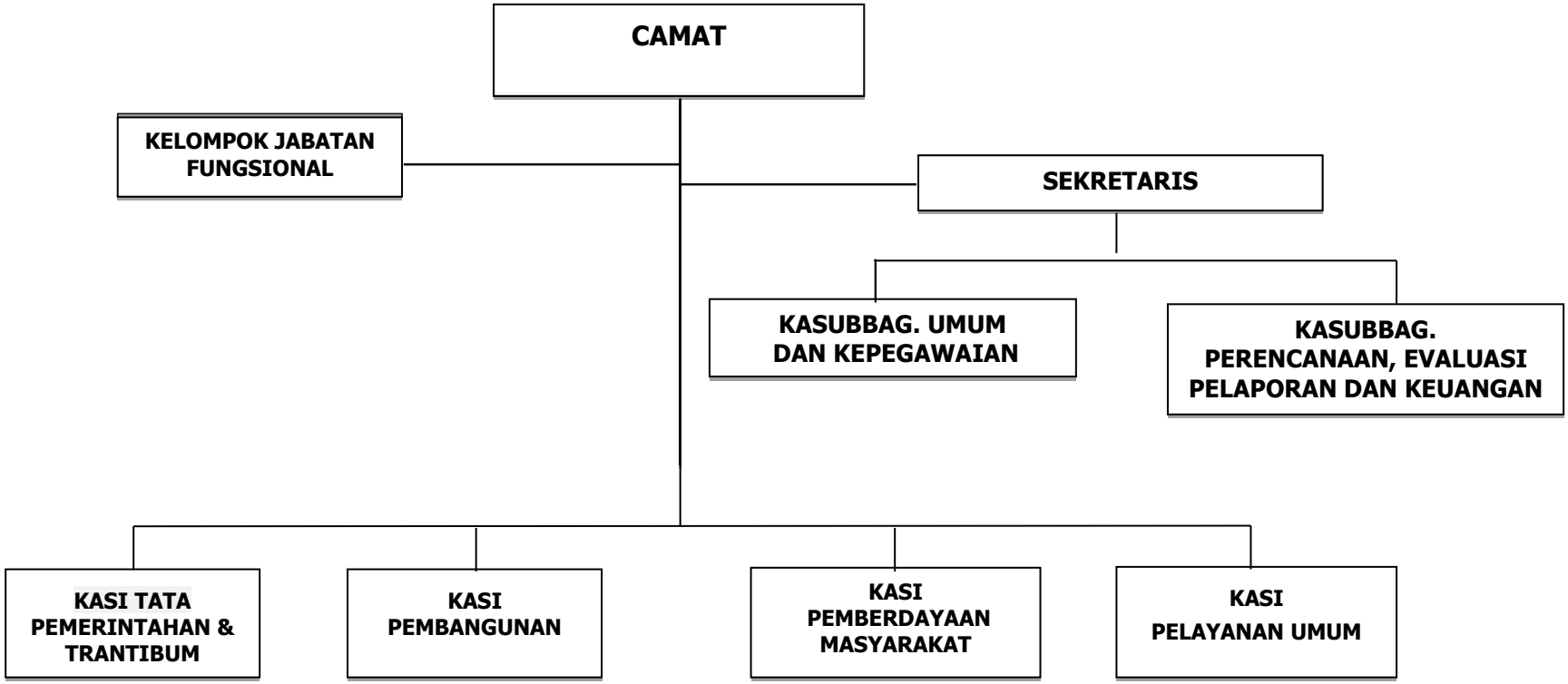

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Pangkalbalam

2.2 Uraian Tugas

Tugas Pokok dan Fungsi satuan organisasi kecamatan Pangkalbalam sebagaimana dimuat dalam pada peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi ,Tugas dan Fungsi Serta tata kerja Kecamatan dan Kelurahan dalam wilayah kota Pangkalpinang disesuaikan dengan struktur organisasi Kecamatan Pangkalbalam dapat dijelasakan sebagai berikut:

1. Camat

Camat mempunyai tugas menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum, mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan, melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Kota yang ada di kecamatan; dan melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; serta melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota yang dilimpahkan kepada camat. Dalam melaksanakan tugas pokok Camat mempunyai fungsi:

a. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan;
b. melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
c. melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia, pemuka agama serta tokoh masyarakat yang berada di wilayah kerja Kecamatan mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
d. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang

penerapan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;

e. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
f. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
g. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
h. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
i. melakukan perencanaan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan;
j. melakukan bimbingan, fasilitasi, konsultasi dan pembinaan serta pengawasan tertib administrasi pemerintahan Kelurahan;
k. melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap Lurah beserta perangkat kelurahan atas penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan di tingkat Kecamatan;
l. melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
m. pelaksanaan pelaporan kegiatan lingkup kecamatan kepada Walikota yang meliputi : pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum, pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan, pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan di wilayah Kecamatan.
n. pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan Pemerintah Kota yang meliputi perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan lingkup Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Camat Kecamatan Tipe A membawahi:

a. Sekretaris Kecamatan;

b. Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;

c. Seksi Pelayanan Umum;

d. Seksi Pembangunan;

e. Seksi Pemberdayaan masyarakat;

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Sekretaris Camat

Sekretaris Kecamatan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat serta mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan administratif serta fungsional kepada seluruh unit organisasi di lingkungan kecamatan. Dalam melaksanakan tugas Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan koordinasi Kecamatan;
b. penyusunan rencana program dan anggaran kecamatan;
c. penyelenggaraan urusan ketatausahaan, perencanaan, rumah tangga, kepegawaian, hukum dan organisasi serta hubungan masyarakat lingkup kecamatan;
d. penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan dan pengelolaan sarana kecamatan;
e. pelaksanaan ketatalaksanaan, kearsipan, dokumentasi, dan perpustakaan;
f. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;
g. pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian kegiatan Kecamatan dengan Instansi terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan;
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pengendalian administratif kegiatan Kesekretariatan dan Kecamatan;
i. pengoordinasian, pengkonsolidasian, pengumpulan bahan informasi dan pengelolaan bahan informasi daerah wilayah kecamatan; dan
j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Sekretaris Kecamatan membawahi:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan

3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi serta pelayanan informasi kecamatan. Untuk melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Kecamatan;
b. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan dan perpustakaan, penyelenggaraan kerumahtanggaan dan pengelolaan perlengkapan Kecamatan;
c. pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi perencanaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, yaitu kenaikan gaji berkala, cuti, disiplin, pengembangan, diklat dan kesejahteraan pegawai;
d. pengelolaan dan pemeliharaan barang milik/kekayaan daerah lingkup Kecamatan;
e. penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan sarana dan prasarana perlengkapan kantor Kecamatan dan koordinasi serta fasilitasi rencana kebutuhan kantor kelurahan;
f. pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi umum dan kepegawaian dengan unit kerja di lingkungan Kecamatan;
g. pengelolaan jaringan komunikasi dan informasi Sekretariat Kecamatan; penyimpanan, pendokumentasian, penyedian dan pemberian pelayanan informasi kepada publik; pelaksanaan verifikasi bahan informasi publik; pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan; pemuktahiran informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat; penyampaian informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi secara berkala
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan. Kepala sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan administrasi keuangan, administrasi pengelolaan barang milik/kekayaan daerah serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan mempunyai fungsi :

a. penyusunan bahan perencanaan program dan kegiatan (Renstra, Renja, dan Perjanjian Kinerja, Rencana Umum Penganggaran, RKA/DPA Kesekretariatan) Kecamatan;
b. penyusunan bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan (Laporan Evaluasi Renja dan Renstra Kecamatan;
c. penyusunan laporan akhir pelaksanaan program dan kegiatan (LAKIP, LPPD, LKPJ) kecamatan;
d. pelaksanaan pengelolaan administrasi Keuangan kecamatan yang meliputi analisis keuangan, perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, monitoring evaluasi anggaran, dan pelaporan keuangan semester dan akhir tahun kecamatan;
e. pelaksanaan administrasi pengelolaan barang milik/kekayaan daerah kecamatan;
f. pengoordinasian pelaporan lingkup kegiatan pengelolaan program kerja dan Administrasi Keuangan Kecamatan;
g. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

5. Seksi Tata Pemerintahan dan Trantibum

Seksi Tata Pemerintahan dan Trantibum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Camat. Kepala seksi Tata Pemerintahan dan Trantibum melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang Pemerintahan dan Trantibum. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Tata Pemerintahan dan Trantibum mempunyai fungsi:

a. pengumpulan data dan bahan lingkup Tata pemerintahan meliputi pengumpulan dan pengolahan data pemerintahan dan kependudukan, penyusunan dan pemutakhiran data monografi Kecamatan;
b. pengoordinasian penyusunan profil Kelurahan dan Kecamatan;
c. pelaksanaan fasilitasi urusan pemerintahan yang meliputi pembinaan Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT), pelayanan administrasi pertanahan, pembinaan administrasi pemerintahan Kelurahan, administrasi kependudukan,;
d. penyusunan bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan meliputi bahan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, bahan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan organisasi perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, bahan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Walikota, bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan Kelurahan, bahan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi Kelurahan, bahan pembinaan dan pengawasan terhadap Lurah, bahan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Kelurahan, bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan di tingkat Kecamatan, bahan pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Walikota;
e. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya;
g. pelaporan pelaksanaan lingkup pemerintahan.

6. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum Kepala Seksi Pelayanan Umum yang bertanggung jawab kepada Camat. Kepala Seksi Pelayanan Umum melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang Pelayanan Umum. Untuk melaksanakan tugas Kepala seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi:

a. pengumpulan data dan bahan lingkup Pelayanan Umum;
b. pelayanan data dan informasi Kecamatan;

c. Pengoordinasian dan penyiapan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat di lingkup kecamatan dan kelurahan di wilayahnya, meliputi standar pelayanan, survei kepuasan masyarakat, pengembangan inovasi pelayanan publik;
d. Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan Penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat serta percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya;
f. pelaporan pelaksanaan lingkup Pelayanan Umum.

7. **Seksi Pembangunan**

Seksi Pembagunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pembangunan yang bertanggung jawab kepada Camat. Kepala Seksi Pembagunan melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang Pembangunan. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Pembangunan mempunyai fungsi:

a. pengumpulan data dan bahan lingkup Pembangunan;
b. pelaksanaan urusan pembangunan tingkat Kecamatan meliputi pemeliharaan sarana dan prasarana fisik kantor Kecamatan dan Kelurahan, fasilitasi lembaga pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan masyarakat Kecamatan dan Kelurahan, inventarisasi potensi ekonomi masyarakat dan pembangunan, pembinaan pelayanan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi lingkup kecamatan dan kelurahan di wilayahnya, pembantuan pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak bumi dan bangunan serta pajak-pajak lainnya di wilayah Kecamatan;
c. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di wilayah Kecamatan;
d. penyusunan bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pembangunan di tingkat Kecamatan meliputi bahan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, bahan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, bahan pelaporan pelaksanaan

pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Walikota;

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya;

f. pelaporan pelaksanaan lingkup pembangunan.

8. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang bertanggung jawab kepada Camat.Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang Pemberdayaan Masyarakat. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

a. pengumpulan data dan bahan lingkup Pemberdayaan Masyarakat;

b. pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian kegiatan bidang kesehatan, kemasyarakatan, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), koordinasi Jaringan Pengaman dan Kesejahteraan sosial (JPS) dengan Instansi terkait, pembinaan bidang keagamaan, ketahanan keluarga, partisipasi dan pemberdayaan perempuan serta generasi muda dan fasilitasi pembinaan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan ekonomi dan ketahanan pangan dengan Instansi terkait;

c. pemberdayaan lembaga-lembaga kemasyarakatan/swasta dan tokoh masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan

d. Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan Penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat wilayahnya;

e. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya;

f. pelaporan pelaksanaan lingkup Pemberdayaan Masyarakat

2.3 Sumber Daya Kecamatan Pangkalbalam

Pegawai di lingkungan Kecamatan Pangkalbalam sampai dengan Februari tahun 2023 sebanyak 72 orang, terdiri dari 43 PNS (30 laki-laki dan 13 perempuan) dan 29 non PNS (7 laki-laki dan 22 perempuan). Dilihat dari pendidikannya, terlihat jumlah

pegawai paling banyak berpendidikan S1 sejumlah 40 orang, dan berpendidikan SMA/Sederajat sejumlah 31 orang dan berpendidikan D1/D2/D3 sejumlah 1 orang. Jumlah pegawai berdasarkan status kepegawaian Per Februari tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.3.1 sebagai berikut:

Tabel 2.3.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kecamatan Pangkalbalam Tahun 2023

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah		
		L	P	L	P	L	P	∑
1	SMP Sederajat	0	0	0	0	0	0	0
2	SMA Sederajat	7	5	14	5	21	10	31
3	D1/D2/D3	1	0	0	0	1	0	1
4	D IV	0	0	0	0	0	0	0
5	S1	21	9	8	2	29	11	40
6	S2	0	0	0	0	0	0	0
7	S3	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	**29**	**14**	**22**	**7**	**51**	**21**	**72**

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Pangkalbalam Tahun 2023

Dilihat dari golongannya, pada tahun 2023 pegawai PNS paling banyak dari golongan III yaitu sejumlah 32, golongan II sejumlah 10 dan golongan IV sejumlah 1 orang, seperti terlihat pada Tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2.3.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di Kecamatan Pangkalbalam Desember Tahun 2022

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan I	0	0	0
2	Golongan II	8	2	10
3	Golongan III	20	12	32
4	Golongan IV	1	0	1
	Jumlah	**29**	**14**	**43**

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Pangkalbalam Tahun 2023

Sarana dan prasarana yang dimiliki Kecamatan Pangkalbalam meliputi Aset Tetap dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2.3.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
di seluruh wilayah Kecamatan Pangkalbalam per Desember Tahun 2022

No	Aset / Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi
1.	Tanah	15	Baik
2.	Bangunan Gedung :		
	a. Gedung Kantor	15	Baik
	b. Gedung Pertemuan/Aula	1	Baik
	c. Pos Jaga	2	Baik
	d. Tempat Parkir	2	Baik
	e. Bangunan Tempat Ibadah	1	Kurang Baik
	e. Bangunan Lain - lain	9	Kurang Baik
3.	Peralatan Kantor	1619	Baik
		15	Kurang Baik
4.	Kendaraan Dinas	18	Baik

Sumber: Sub bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Pangkalbalam tahun 2022

2.4 Kinerja Pelayanan Kecamatan Pangkalbalam

Kinerja pelayanan kecamatan dapat diukur dari ketercapaian tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkanya. seiring dengan misi yang dimiliki oleh Kecamatan Pangkalbalam terdapat beberapa faktor kunci keberhasilan yang turut mendukung pencapaian misi tersebut meliputi :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2. Persentase Sarana dan Prasarana Publik yang terbangun
3. Persentase Waktu Pelayanan Administrasi Tepat Waktu
4. Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif
5. Persentase Keluhan Masyarakat yang di tindaklanjuti
6. Tingkat Pencapaian Nilai AKIP Kecamatan Pangkal Balam "B"

Kinerja Kecamatan Pangkalbalam selama kurun waktu tahun 2018-2013 terdapat pada Tabel 2.4.1 sebagai berikut:

Tabel 2.4.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pangkalbalam Tahun 2021-2022

Kota Pangkalpinang

No	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/ PROGRAM	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN REALISASI	
							2021	2022	2021	2022	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7			8		9	
	Meningkatkan Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan			Indek Kepuasan Pelayanan Kecamatan		Nilai	3,2	3,3	3,60	3,65	112,50	110,60
		Meningkatnya Jumlah Keluhan Masyarakat yang ditindaklanjuti		Persentase Keluhan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti		%	80	85	100	100	125	117,65
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumah laporan kinerja dan keuangan tahun berkenaan yang disampaikan tepat waktu dibagi jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disusun pada tahun berkenaan x 100	%	100	100	100	100	100	100

No	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/ PROGRAM	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN REALISASI	
							2021	2022	2021	2022	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7			8		9	
				Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek /diklat/workshop pada tahun berkenaan dibagi jumlah total ASN pada tahun berkenaan x 100	%	100	100	13,69	13,69	13,69	13,69
				Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah total sub kegiatan administrasi perkantoran yang direncanakan dibagi jumlah total sub kegiatan administrasi perkantoran yang terealisasi pada tahun berkenaan x 100 %	%	100	100	100	100	100	100

No	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/ PROGRAM	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN REALISASI	
							2021	2022	2021	2022	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7			8		9	
				Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah sarana dan prasarana pada tahun berkenaan dalam kondisi baik dibagi jumlah total sarana dan prasarana pada tahun berkenaan x 100 %	%	100	100	100	100	100	100
				Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan DIBAGI layanan administrasi perkantoran yang dibutuhkan DIKALI 100	%	100	100	100	100	100	100
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	Jumlah waktu layanan administrasi yang dilaksanakan DIBAGI waktu	%	80	85	100	100	125	117,65

No	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/ PROGRAM	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN REALISASI	
							2021	2022	2021	2022	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7			8		9	
					layanan administrasi perkantoran yang dibutuhkan DIKALI 100							
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan lembaga kemasyarakatan yang aktif dikali 100	%	60	80	100	100	166,67	125
				Persentase Sarana dan Prasarana Publik Yang Terbangun	Jumlah Pembangunan Sarana dan prasarana dibagi Jumlah Sarana dan prasarana yang dibangun dikali 100	%	60	80	0	0	0	0
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	Jumlah keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti dibagi Jumlah Keluhan	%	60	80	100	100	166,67	125

No	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/ PROGRAM	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN REALISASI	
							2021	2022	2021	2022	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7			8		9	
					Masyarakat yang Masuk dikali 100							
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Di Kecamatan	Jumlah Terselenggaranya urusan Pemerintahan umum yang dijalankan dibagi Terselenggaranya Urusan Pemerintahan umum dikali 100	%	60	80	100	100	166,67	125

Untuk Anggaran dan realisasi anggaran Kecamatan Pangkalbalam selama kurun waktu tahun 2021-2022 terdapat pada Tabel 2.4.2 sebagai berikut:

Tabel 2.4.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Pangkalbalam

Kota Pangkalpinang tahun 2021-2022

Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019/Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021

Program dan Kegiatan	Anggaran Pada Tahun ke		Realisasi Anggaran pada tahun ke		Persentase Realisasi Anggaran Pada Tahun ke		Pertumbuhan Anggaran	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Anggaran
	2021	2022	2021	2022	2021	2022		
BELANJA OPERASIONAL	**8.424.696.400,00**	**8.137.346.352**	**7.028.856.446,00**	**7.372.842.805**	**83,43%**	**90,61%**	**(287.350.048)**	**87,02%**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.061.112.950,00	5.208.946.222	4.863.349.306,00	4.987.800.776	96,09%	95,75%	147.833.272	95,92%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.279.978.794,00	4.280.516.622	4.156.181.491,00	4.095.511.987	97,11%	95,68%	537.828	96,40%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.279.978.794,00	4.280.316.622	4.156.181.491,00	4.095.311.987	97,11%	95,68%	337.828	96,40%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8.600.000,00	8.500.000	8.600.000,00	7.500.000	100,00%	88,24%	(100.000)	94,12%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	8.600.000,00	8.500.000	8.600.000,00	7.500.000	100,00%	88,24%	(100.000)	94,12%

Program dan Kegiatan	Anggaran Pada Tahun ke		Realisasi Anggaran pada tahun ke		Persentase Realisasi Anggaran Pada Tahun ke		Pertumbuhan Anggaran	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Anggaran
	2021	2022	2021	2022	2021	2022		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	132.325.056,00	170.400.000	129.330.800,00	168.447.722	97,74%	98,85%	38.074.944	98,30%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.317.500,00	9.000.000	12.317.500,00	8.997.000	100,00%	99,97%	(3.317.500)	99,99%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	80.772.556,00	51.000.000	77.823.000,00	50.986.500	96,35%	99,97%	(29.772.556)	98,16%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	28.010.000,00	20.400.000	28.010.000,00	20.397.800	100,00%	99,99%	(7.610.000)	100,00%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11.225.000,00	90.000.000	11.180.300,00	88.066.422	99,60%	97,85%	78.775.000	98,73%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.000.000,00	163.000.000	0	155.493.500	0,00%	95,39%	159.000.000	47,70%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	163.000.000	0	155.493.500	0,00%	95,39%	163.000.000	47,70%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.000.000,00	0	4.000.000,00	0	100,00%	0,00%	(4.000.000)	50,00%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.000.000,00	0	4.000.000,00	0	100,00%	0,00%	(4.000.000)	50,00%

Program dan Kegiatan	Anggaran Pada Tahun ke		Realisasi Anggaran pada tahun ke		Persentase Realisasi Anggaran Pada Tahun ke		Pertumbuhan Anggaran	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Anggaran
	2021	2022	2021	2022	2021	2022		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	570.016.100,00	515.569.600	511.725.458,00	493.672.067	89,77%	95,75%	(54.446.500)	92,76%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	79.447.700,00	77.995.200	77.950.500,00	76.800.000	98,12%	98,47%	(1.452.500)	98,30%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	74.390.000,00	34.100.000	34.174.958,00	30.312.067	45,94%	88,89%	(40.290.000)	67,42%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.000.000,00	29.500.000	32.000.000,00	25.460.000	80,00%	86,31%	(10.500.000)	83,16%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	376.178.400,00	373.974.400	367.600.000,00	361.100.000	97,72%	96,56%	(2.204.000)	97,14%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	66.193.000,00	70.360.000	53.511.557,00	66.575.500	80,84%	94,62%	4.167.000	87,73%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.574.500,00	0	30.214.051,00	0	80,41%	0,00%	(37.574.500)	40,21%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	28.618.500,00	70.360.000	23.297.506,00	66.575.500	81,41%	94,62%	41.741.500	88,02%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	411.669.050,00	0	383.413.076,00	0	93,14%		(411.669.050)	93,14%

Program dan Kegiatan	Anggaran Pada Tahun ke		Realisasi Anggaran pada tahun ke		Persentase Realisasi Anggaran Pada Tahun ke		Pertumbuhan Anggaran	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Anggaran
	2021	2022	2021	2022	2021	2022		
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	21.010.000,00	1.000.000	20.985.000,00	975.000	99,88%	97,50%	(20.010.000)	98,69%
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	11.010.000,00	0	11.010.000,00	0	100,00%	0,00%	(11.010.000)	50,00%
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10.000.000,00	1.000.000	9.975.000,00	975.000	99,75%	97,50%	(9.000.000)	98,63%
Penyelenggaran Urusan Pemerintahanyang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	371.345.050,00	0,00	362.428.076,00	0,00	97,60%		(371.345.050)	97,60%
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	3.510.000,00	5.000.000	2.500.000,00	5.000.000	71,23%	100,00%	1.490.000	85,62%
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan (Kelurahan Pasir Garam)	75.245.100,00	127.844.580	74.532.100,00	125.769.636	99,05%	98,38%	52.599.480	98,72%

Program dan Kegiatan	Anggaran Pada Tahun ke		Realisasi Anggaran pada tahun ke		Persentase Realisasi Anggaran Pada Tahun ke		Pertumbuhan Anggaran	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Anggaran
	2021	2022	2021	2022	2021	2022		
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan (Kelurahan Lontong Pancur)	70.405.500,00	124.556.300	68.698.963,00	120.365.176	97,58%	96,64%	54.150.800	97,11%
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan (Kelurahan Ketapang)	68.083.900,00	121.250.000	66.473.150,00	117.757.245	97,63%	97,12%	53.166.100	97,38%
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan (Kelurahan Ampui)	85.999.450,00	132.602.000	83.851.750,00	129.836.654	97,50%	97,91%	46.602.550	97,71%
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan (Kelurahan Rejosari)	68.101.100,00	122.545.250	66.372.113,00	118.912.413	97,46%	97,04%	54.444.150	97,25%
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	19.314.000,00	2.100.000	-	2.100.000	-	100,00%	(17.214.000)	100,00%
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	19.314.000,00	2.100.000	0	2.100.000	-	100,00%	(17.214.000)	100,00%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.814.209.900,00	2.249.502.000,00	1.649.714.064,00	1.725.125.905,00	58,62%	76,69%	(564.707.900)	67,65%
Kegiatan Pemberdayaan kelurahan	2.726.389.900,00	2.184.502.000	1.572.701.977	1.661.903.540	57,68%	76,08%	(541.887.900)	66,88%

Program dan Kegiatan	Anggaran Pada Tahun ke		Realisasi Anggaran pada tahun ke		Persentase Realisasi Anggaran Pada Tahun ke		Pertumbuhan Anggaran	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Anggaran
	2021	2022	2021	2022	2021	2022		
Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan	9.992.500,00	100.000	9.992.500,00	0	100,00%	0,00%	(9.892.500)	50,00%
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pasir Garam	0	0	0	0	0,00%	0	-	0,00%
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Lontong pancur	0	0	0	0	0,00%	0	-	0,00%
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Ketapang	0	0	0	0	0,00%	0	-	0,00%
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Ampui	0	0	0	0	0,00%	0	-	0,00%
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Rejosari	0	0	0	0	0,00%	0	-	0,00%
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pasir Garam	306.446.500,00	317.660.400	304.204.000,00	314.684.540	99,27%	99,06%	11.213.900	99,17%
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lontong Pancur	323.673.000,00	333.410.400	322.473.000,00	330.020.000	99,63%	98,98%	9.737.400	99,31%
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ketapang	321.256.900,00	351.260.400	314.624.000,00	346.370.000	97,94%	98,61%	30.003.500	98,28%
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ampui	285.535.800,00	301.110.400	278.462.000,00	293.214.000	97,52%	97,38%	15.574.600	97,45%
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Rejosari	346.115.200,00	380.960.400	342.946.477,00	377.615.000	99,08%	99,12%	34.845.200	99,10%

Program dan Kegiatan	Anggaran Pada Tahun ke		Realisasi Anggaran pada tahun ke		Persentase Realisasi Anggaran Pada Tahun ke		Pertumbuhan Anggaran	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Anggaran
	2021	2022	2021	2022	2021	2022		
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kelurahan Pasir Garam	226.010.000,00	100.000.000	0	0	0,00%	0,00%	(126.010.000)	0,00%
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kelurahan Lontong Pancur	226.010.000,00	100.000.000	0	0	0,00%	0,00%	(126.010.000)	0,00%
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kelurahan Ketapang	226.010.000,00	100.000.000	0	0	0,00%	0,00%	(126.010.000)	0,00%
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kelurahan Ampui	226.010.000,00	100.000.000	0	0	0,00%	0,00%	(126.010.000)	0,00%
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kelurahan Rejosari	226.010.000,00	100.000.000	0	0	0,00%	0,00%	(126.010.000)	0,00%
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	87.820.000,00	65.000.000	73.692.087,00	63.222.365	83,91%	97,27%	(22.820.000)	90,59%
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan PKK	87.820.000,00	65.000.000	73.692.087,00	63.222.365	83,91%	97,27%	(22.820.000)	90,59%
Kegiatan Pemberdayaan kelurahan	3.320.000,00	0	3.320.000,00	0	100,00%	0,00%	(3.320.000)	50,00%
Evaluasi Kelurahan	3.320.000,00	0	3.320.000,00	0	100,00%	0	(3.320.000)	50,00%

Program dan Kegiatan	Anggaran Pada Tahun ke		Realisasi Anggaran pada tahun ke		Persentase Realisasi Anggaran Pada Tahun ke		Pertumbuhan Anggaran	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Anggaran
	2021	2022	2021	2022	2021	2022		
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.324.500,00	15.000.000	0	12.200.000	0,00%	81,33%	9.675.500	40,67%
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	5.324.500,00	15.000.000	0	12.200.000	0,00%	81,33%	9.675.500	40,67%
Sinergitas dengan Kepolisiaan Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	5.324.500,00	15.000.000	0	12.200.000	0,00%	81,33%	9.675.500	40,67%
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	132.380.000,00	27.000.000	132.380.000,00	27.000.000	100,00%	100,00%	(105.380.000)	100,00%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	132.380.000,00	27.000.000	132.380.000,00	27.000.000	100,00%	100,00%	(105.380.000)	100,00%
Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	132.380.000,00	27.000.000	132.380.000,00	27.000.000	100,00%	100,00%	(105.380.000)	100,00%

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Pangkalbalam

2.5.1 KEKUATAN

1. Letak yang strategis karena dekat dari pelabuhan
2. Terletak di wilayah industri dan pengembangan perekonomian

2.5.2 KELEMAHAN

1. Masih kurangnya infrastruktur atau sarana dan prasarana yang memadai sehingga pelaksanaan program kegiatan terasa terhambat dalam progresnya
2. Masih kurangnya kualitas maupun kuantitas pegawai di Kecamatan maupun di Kelurahan – kelurahan

2.5.3 TANTANGAN

Tantangan merupakan adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan. Tantangan Pengembangan Pelayanan Kecamatan Pangkalbalam sebagai berikut:

1. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.
2. Masih rendahnya tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan
3. Masih tingginya penyakit Masyarakat

2.5.4 PELUANG

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan. Peluang dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Pangkalbalam sebagai berikut:

1. Adanya perubahan paradigma sistem pemerintahan demokratis dapat meningkatkan peran Kecamatan Pangkalbalam dalam perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah
2. Kepercayaan dari pimpinan daerah dan masyarakat kepada Kecamatan Pangkalbalam untuk memacu dan memotivasi menjawab tantangan dan permasalahan di masa depan
3. Kemajuan perkembangan teknologi dan informasi yang cepat.
4. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai.

2.6 Kelompok Sasaran Layanan Kecamatan Pangkalbalam

Sesuai dengan tugas dan fungsi dari Kecamatan sebagai pelayanan publik, maka kelompok sasaran layanan kecamatan Pangkalbalam adalah masyarakat, khususnya masyarakat Kecamatan Pangkalbalam. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Pangkalbalam dibantu oleh lembaga kemasyarakatan yang tersebar di 5 Kelurahan, dimana secara langsung berhubungan dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan publik.

Tabel 2.6.1

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan Pangkalbalam

Data Desember Tahun 2022

No	Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan					
		RW	RT	PKK	Posyandu	LPM	Karang Taruna
1	Pasir Garam	2	7	10	3	1	1
2	Ketapang	3	8	12	6	1	1
3	Lontong Pancur	2	8	11	5	1	1
4	Ampui	2	6	9	4	1	1
5	Rejosari	3	10	14	6	1	1
	Jumlah	**12**	**39**	**56**	**24**	**5**	**5**

Selain lembaga kemasyarakatan, Kecamatan Pangkalbalam juga dibantu dengan mitra dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Adapun mitra Kecamatan Pangkalbalam antara lain :

1. Kepolisian
2. Koramil
3. BNN

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
KECAMATAN PANGKALBALAM

Sebelum membahas tentang tujuan dan sasaran, perlu dilakukan analisis permasalahan dan isu strategis untuk mengetahui masalah yang sedang terjadi. Dari rumusan permasalahan itu, kita dapat merumuskan tujuan dan sasaran. Perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Kecamatan Pangkalbalam.

Dalam perumusan permasalahan isu strategis Kecamatan Pangkalbalam diantaranya dengan identifikasi permasalahan berdasarkan kondisi riil Kecamatan Pangkalbalam, telahaan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, sampai dengan tujuan akhir adalah melakukan penentuan isu - isu strategis Kecamatan Pangkalbalam.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Pangkalbalam

Permasalahan Umum

1) Belum Optimalnya Kualitas dan Kuantitas SDM Aparatur Kecamatan dan Kelurahan;
2) Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata secara sistematis;
3) Belum optimalnya pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
4) Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;
5) Tingginya kejadian penyakit masyarakat dan kenakalan Remaja;

3.2 Telaahan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dalam mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan visi pembangunan Kota Pangkalpinang.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Selama masa transisi di tahun 2024-2026, Kota Pangkalpinang memiliki tujuan yang akan menjadi tolak ukur pembangunan selama tiga tahun mendatang. Adapun tujuan Kota Pangkalpinang di tahun 2024-2026 yaitu:

"Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Baik Menuju Tercapainya Good Governance"

Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam pembangunan. Adapun sasaran Kota Pangkalpinang dalam mewujudkan tujuan pembangunan selama tahun 2024-2026 sebagai berikut :

"Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT"

Berdasarkan tujuan dan sasaran pembangunan di atas, maka ditetapkan indikator yang kemudian menjadi indikator makro pembangunan daerah selama tahun 2024-2026 sebagai berikut:

Tabel 3.2.1
Tabel Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang Beserta Indikator
Tahun 2024-2026

Tujuan Kota	Indikator	Sasaran	Indikator
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Baik Menuju Tercapainya Good Governance	INDEKS REFORMASI BIROKRASI	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kota Pangkalpinang, Kecamatan Pangkalbalam memiliki beberapa faktor pendorong dan faktor penghambat yang dihadapi sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Pangkalbalam Terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah

No	Tujuan dan Sasaran RPD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Tujuan : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Baik Menuju Tercapainya Good Governance. **Sasaran :** Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT.	1. Belum Optimalnya Kualitas dan Kuantitas SDM Aparatur Kecamatan dan Kelurahan; 2. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata secara sistematis; 3. Belum optimalnya pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN); 4. Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah; 5. Tingginya kejadian penyakit masyarakat dan kenakalan Remaja;	1. Keterbatasan SDM yang tersedia dan kesempatan dalam peningkatan kompetensi. 2. Belum tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) masing- masing kegiatan di kecamatan 3. Keterbatasan SDM serta sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pelayanan. 4. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. 5. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum	1. Etos kerja yang tinggi dari SDM yang ada. 2. Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan tugas. 3. Komitmen dan kebijakan Pemerintaha Kota dalam Pelayanan kepada masyarakat 4. Komitmen dan kebijakan Pemerintah Kota dalam pembangunan dan kemasyarakatan. 5. Kerjasama yang baik antara masyarakat dan stakeholder yang terkait

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi (Bagi Kabupaten/Kota)

Banyaknya fungsi kecamatan dalam memberikan pelayanan di masyarakat kadang sering berbenturan dengan tugas dan fungsi dinas atau badan bahkan instansi di tingkat provinsi atau pusat. Hal inilah yang harus diperjelas tentang tugas dan fungsinya. Kecamatan hanya mempunyai fungsi fasilitasi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi di tingkat kabupaten, provinsi atau bahkan Kementerian.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya bertujuan mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah dengan rencana pembangunan daerah. Penelaahan dilakukan terhadap kesesuaian rencana struktur ruang, rencana pola ruang, serta rencana indikasi program pemanfaatan ruang.

Berdasarkan Perda Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030, Kecamatan Pangkalbalam memiliki beberapa potensi yang dapat mendukung pembangunan di Kota Pangkalpinang sebagai berikut :

1. Rencana sub pusat pelayanan kota yaitu
   a. Kawasan Pelabuhan
   b. Kawasan perdagangan dan jasa dengan skala pelayanan sub wilayah kota bagian timur laut
2. Rencana sistem jaringan transportasi laut yaitu :
   a. Pelabuhan dan rencana pembangunan terminal pelabuhan
   b. Rute pelayaran pelabuhan
3. TPU dikecamatan Pangkalbalam yaitu :
   a. TPU Ampui
   b. TPU Lontong Pancur

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan. Jika dinamika eksternal, khususnya selama 3 (tiga) tahun yang akan datang, diidentifikasi dengan baik, maka pemerintahan daerah akan dapat mempertahankan/meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Pemerintahan daerah yang tidak menyelaraskan diri secara sepadan atas isu strategisnya akan menghadapi potensi kegagalan dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya atau gagal dalam melaksanakan pembangunan daerah. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar ,berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembangaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Dengan memperhatikan permasalahan pembangunanan wilayah dan pelayanan publik, terdapat Isu strategis yang perlu ditangani dalam pelaksanaan Renstra Kecamatan Pangkalbalam sebagai berikut:

1) Belum optimalnya pelayanan publik.
2) Belum optimalnya Pengelolaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
3) Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam partisipasi penyelenggaraan pembangunan wilayah;
4) Masih Tingginya angka penyakit masyarakat (PEKAT);

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Kecamatan Pangkalbalam

Dalam mendukung tujuan Kota Pangkalpinang tahun 2024-2026 yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026, Kecamatan Pangkalbalam juga menentukan tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Kecamatan Pangkalbalam dalam kurun waktu tahun 2024-2026 yaitu "**Meningkatkan Kepuasan masyarakat atas Pelayanan Kecamatan Pangkalbalam**" dengan indikator yaitu **Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan Pangkalbalam**, dengan target kinerja setiap tahun dari 2024 sampai dengan 2026.

4.2 Sasaran Kecamatan Pangkalbalam

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Kecamatan Pangkalbalam dalam kurun waktu tahun 2024-2026 yaitu

1. **Terselenggaranya pelayanan publik di kecamatan Pangkalbalam**.
2. **Terselesainya permasalahan dan pengaduan masyarakat di kecamatan Pangkalbalam.**

Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini:

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Kecamatan Pangkalbalam Tahun 2024-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formula/Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2021	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun		
							2024	2025	2026
1	Meningkatkan Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Pangkalbalam		Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan Pangkalbalam	Mengacu Kepada Permenpan RB No 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Nilai	NA	88,30	88,50	89,00
		Terselenggaranya pelayanan publik di kecamatan Pangkalbalam	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan PangkalBalam	Jumlah surat keterangan atau rekomendasi dan lain-lain yang dikeluarkan oleh kecamatan tahun berkenaan/jumlah permintaan surat keterangan atau surat rekomendasi dan lain-lain dari masyarakat yang diterima tahun berkenaan x 100%	%	100	100	100	100
		Terselesainya permasalahan dan pengaduan masyarakat di kecamatan Pangkalbalam	Persentase permasalahan dan pengaduan masyarakat yang ditangani di Kecamatan Pangkal Balam	Jumlah permasalahan di masyarakat yang ditindaklanjuti tahun berkenaan dibagi Jumlah permasalahan atau laporan pengaduan masyarakat yang terjadi tahun berkenaan x 100%	%	NA	100	100	100

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi merupakan pernyataan - pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Kecamatan Pangkalbalam selama kurun waktu 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Budaya pelayanan prima dengan standar operating prosedur yang berlaku di Kecamatan Pangkalbalam.
2. Meningkatkan pelayanan pengaduan yang tersistem secara baik di Kecamatan Pangkalbalam.

5.2 Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil Kecamatan Pangkalbalam dalam rangka pelaksanaan strategi adalah :

1. Mewujudkan akuntabilitas kinerja dan pelayanan prima internal dan perangkat daerah.
2. Menyelenggarakan Urusan pemerintahan Umum di Kecamatan Pangkal Balam.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang terbangun di Kecamatan Pangkal Balam
4. Mengoptimalkan fungsi Lembaga Kemasyarakatan yang aktif di Kecamatan Pangkal Balam.
5. Meningkatkan waktu pelayanan administrasi tepat waktu di Kecamatan Pangkal Balam.
6. Melaksanakan ketentraman dan ketertiban Umum di Kecamatan Pangkal Balam

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan Kecamatan Pangkalbalam dalam tiga tahun mendatang dicantumkan pada tabel 5.1 berikut ini:

Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Pangkalbalam

Tujuan RPD : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Baik Menuju Tercapainya Good Governance				
Sasaran RPD : Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT				
Tujuan Renstra	**Sasaran Renstra**	**Strategi Renstra**	**Arah Kebijakan Renstra**	**Program**
Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan kecamatan Pangkalbalam	Terselenggaranya pelayanan publik di kecamatan Pangkalbalam	Meningkatkan budaya pelayanan prima dengan standar operating prosedur yang berlaku di Kecamatan Pangkalbalam.	1. Mewujudkan akuntabilitas kinerja dan pelayanan prima internal dan perangkat daerah. 2. Menyelenggarakan Urusan pemerintahan Umum di Kecamatan Pangkal Balam. 3. Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang terbangun di Kecamatan Pangkal Balam. 4. Mengoptimalkan fungsi Lembaga Kemasyarakatan yang aktif di Kecamatan Pangkal Balam.	1. Program penunjang Urusan Pemerintah Daerah. 2. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. 3. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
	Terselesaikannya permasalahan dan pengaduan masyarakat di kecamatan Pangkalbalam	Meningkatkan pelayanan pengaduan yang tersistem secara baik di Kecamatan Pangkalbalam.	1. Meningkatkan waktu pelayanan administrasi tepat waktu di Kecamatan Pangkal Balam. 2. Melaksanakan ketentraman dan ketertiban Umum di Kecamatan Pangkal Balam.	1. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. 2. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum

BAB VI
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang pada Rencana Strategis tahun 2024-2026, adalah sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

   Sub kegiatan:

   a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
   c. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
   d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   e. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

   Sub Kegiatan:

   a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
   c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

   Sub Kegiatan:

   a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
   b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

4) Administrasi Umum Perangkat Daerah

   Sub Kegiatan:

   a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan:

a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
b. Pengadaan Mebel
c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub kegiatan:

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub kegiatan:

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

1) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Sub Kegiatan:

a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

2) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

Sub Kegiatan:

a. Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan

b. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Pasir Garam
c. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Lontong Pancur
d. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Ketapang
e. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan kelurahan Ampui
f. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan kelurahan rejosari

3) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Sub Kegiatan:

a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

1) Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Sub kegiatan:

a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Ampui
c. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Rejosari
d. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Lontong Pancur
e. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pasir Garam
f. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Ketapang
g. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan
h. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan ampui
i. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan rejosari
j. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan lontong pancur
k. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan pasir garam
l. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan ketapang
m. Evaluasi Kelurahan

2) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

   Sub kegiatan:

   a. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

   Sub kegiatan:

   a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

   a. Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal

   b. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Secara rinci rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif secara rinci tercantum pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1(a)
Rencana Program, Kegiatan Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah
Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca-naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
-															
	Terselenggaranya pelayanan publik di kecamatan Pangkalbalam														
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Di Kecamatan Pangkal Balam (Dengan Satuan:%)	100	100	167.500.000	100	167.500.000	100	167.500.000	100	502.500.000	Sekretaris Kecamatan Pangkalbalam	
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase penyelenggaraan kegiatan urusan pemerintahan di Kecamatan Pangkal Balam penugasan kepala Daerah dalam rangka koordinasi pimpinan (Dengan Satuan:%)	0	100	167.500.000	100	167.500.000	100	167.500.000	100	502.500.000	Kasi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	
				Persentase penyelenggaraan kegiatan urusan pemerintahan di Kecamatan Pangkal Balam penugasan kepala Daerah dalam rangka pemberdayaan masyarakat (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		Kasi Pemberdayaan masyarakat	
		7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	160.000.000	1	160.000.000	1	160.000.000	3	480.000.000	Kasi Pemberdayaan masyarakat	Kecamatan Pangkalbalam

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca-naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1	7.500.000	1	7.500.000	1	7.500.000	3	22.500.000	Kasi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Pangkalbalam
Meningkatkan Kepuasan masyarakat atas Pelayanan Kecamatan Pangkalbalam															
	Terselenggaranya pelayanan publik di kecamatan Pangkalbalam														
		7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Kecamatan Pangkalbalam (Dengan Satuan:nilai)**	**66,11**	**68,00**	**5.776.243.951**	**70,00**	**5.918.182.180**	**71,00**	**5.955.182.180**	**71,00**	**17.649.608.311**	**Sekretaris Kecamatan Pangkalbalam**	
				Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Kecamatan Pangkalbalam (Dengan Satuan:nilai)	**3,6**	**3,65**		**3,70**		**3,75**		**3,75**		**Sekretaris Kecamatan Pangkalbalam**	
		7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase penyampaian dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja perangkat daerah tepat waktu (Dengan Satuan:%)**	**100**	**100**	**950.000**	**100**	**950.000**	**100**	**950.000**	**100**	**2.850.000**	**Kasubbag Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan**	
		7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2	250.000	2	250.000	2	250.000	6	750.000	Kasubbag Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan	Kecamatan Pangkalbalam
		7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2	150.000	2	150.000	2	150.000	6	450.000	Kasubbag Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan	Kecamatan Pangkalbalam
		7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2	150.000	2	150.000	2	150.000	6	450.000	Kasubbag Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan	Kecamatan Pangkalbalam

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca-naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	4	4	150.000	4	150.000	4	150.000	12	450.000	Kasubbag Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan	Kecamatan Pangkalbalam
		7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	3	3	250.000	3	250.000	3	250.000	9	750.000	Kasubbag Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan	Kecamatan Pangkalbalam
		7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat daerah sesuai SAP (Dengan Satuan:%)**	**100**	**100**	**4.877.829.151**	**100**	**4.880.767.380**	**100**	**4.880.767.380**	**100**	**14.639.363.911**	**Kasubbag Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan**	
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	41	41	4.877.529.151	41	4.880.467.380	41	4.880.467.380	41	14.638.463.911	Kasubbag Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan	Kecamatan Pangkalbalam
		7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	150.000	1	150.000	1	150.000	3	450.000	Kasubbag Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan	Kecamatan Pangkalbalam
		7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	2	2	150.000	2	150.000	2	150.000	6	450.000	Kasubbag Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan	Kecamatan Pangkalbalam
		7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN (Dengan Satuan:%)**	**0**	**0**	**27.500.000**	**0**	**32.500.000**	**0**	**32.500.000**	**0**	**92.500.000**	**Kasubbag Umum dan Kepegawaian**	
		7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	17.500.000	1	17.500.000	1	17.500.000	3	52.500.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Pangkalbalam

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca-naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan:Orang)	0	2	10.000.000	3	15.000.000	3	15.000.000	8	40.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kota Pangkal Pinang
		7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat Daerah (Dengan Satuan:%)**	**100**	**100**	**178.000.000**	**100**	**178.000.000**	**100**	**178.000.000**	**100**	**534.000.000**	**Kasubbag Umum dan Kepegawaian**	
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	3	45.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Pangkalbalam
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	2	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	6	75.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Pangkalbalam
		7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	6	15.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Pangkalbalam
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	4	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	12	150.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Pangkalbalam
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	2	2	35.000.000	2	35.000.000	2	35.000.000	6	105.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Pangkalbalam
		7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	3	9.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Pangkalbalam
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	45.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000	3	135.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Pangkalbalam

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca-naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pengadaan barang milik perangkat daerah (Dengan Satuan:%)**	**100**	**100**	**0**	**100**	**134.000.000**	**100**	**171.000.000**	**100**	**305.000.000**	**Kasubbag Umum dan Kepegawaian**	
		7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	0	0	2	44.000.000	3	66.000.000	5	110.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Pangkalbalam
		7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	0	0	1	0	0	15.000.000	1	15.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Pangkalbalam
		7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	0	0	1	50.000.000	1	50.000.000	2	100.000.000	Kasi Pembangunan	Kecamatan Pangkalbalam
		7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	0	0	1	40.000.000	1	40.000.000	2	80.000.000	Kasi Pembangunan	Kecamatan Pangkalbalam
		7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:%)**	**100**	**100**	**601.964.800**	**100**	**601.964.800**	**100**	**601.964.800**	**100**	**1.805.894.400**	**Kasubbag Umum dan Kepegawaian**	
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	3	105.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Pangkalbalam
		7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	3	120.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Pangkalbalam
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	526.964.800	1	526.964.800	1	526.964.800	3	1.580.894.400	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Pangkalbalam

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca-naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik perangkat daerah dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)**	**100**	**100**	**90.000.000**	**100**	**90.000.000**	**100**	**90.000.000**	**100**	**270.000.000**	**Kasubbag Umum dan Kepegawaian**	
		7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	3	3	65.000.000	3	65.000.000	3	65.000.000	3	195.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Pangkalbalam
		7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	1	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	75.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Pangkalbalam
		7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun di Kecamatan Pangkal Balam (Dengan Satuan:%)**	**0**	**75,00**	**2.714.695.376**	**80,00**	**2.714.695.376**	**90,00**	**2.792.195.376**	**90,00**	**8.221.586.128**	**Sekretaris Kecamatan Pangkalbalam**	
				Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif di Kecamatan Pangkal Balam (Dengan Satuan:%)	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**Sekretaris Kecamatan Pangkalbalam**	
		7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan kelurahan di Kecamatan Pangkal Balam (Dengan Satuan:%)**	**100**	**100**	**147.500.000**	**100**	**147.500.000**	**100**	**225.000.000**	**100**	**520.000.000**	**Kasi Pembangunan**	
				Persentase penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan kelurahan (Dengan Satuan:%)	**0**	**100**		**100**		**100**		**100**		**-**	
		7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Dengan Satuan:Lembaga Kemasyarakatan)	6	6	15.000.000	6	15.000.000	6	15.000.000	18	45.000.000	Kasi Pembangunan	Kecamatan Pangkalbalam

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca-naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Dengan Satuan:Unit)	0	5	122.500.000	5	122.500.000	5	200.000.000	15	445.000.000	-	Kelurahan Pasir Garam,Kelurahan Lontong Pancur,Kelurahan Ketapang,Kelurahan Ampui,Kelurahan Rejosari
		7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Dengan Satuan:Laporan)	5	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	15	30.000.000	Kasi Pembangunan	Kecamatan Pangkalbalam
		7.01.03.2.03	**PemberdayaanLembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakat tingkat kecamatan yang dilaksanakan di Kecamatan Pangkal Balam (Dengan Satuan:%)**	**100**	**100**	**2.567.195.376**	**100**	**2.567.195.376**	**100**	**2.567.195.376**	**100**	**7.701.586.128**	**Kasi Pemberdayaan masyarakat**	
				Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakat yang dilaksanakan di Kelurahan (Dengan Satuan:%)	**0**	**100**		**100**		**100**		**100**		**-**	
		7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Dengan Satuan:Lembaga Kemasyarakatan)	30	30	2.517.195.376	30	2.517.195.376	30	2.517.195.376	90	7.551.586.128	-	Kelurahan Pasir Garam,Kelurahan Lontong Pancur,Kelurahan Ketapang,Kelurahan Ampui,Kelurahan Rejosari
		7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Dengan Satuan:Lembaga Kemasyarakatan)	0	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	6	150.000.000	Kasi Pemberdayaan masyarakat	Kecamatan Pangkalbalam
	Terselesainya permasalahan dan pengaduan masyarakat di kecamatan Pangkalbalam														
		7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu di Kecamatan Pangkal Balam (Dengan Satuan:%)**	**100**	**100**	**504.925.090**	**100**	**504.925.090**	**100**	**500.411.774**	**100**	**1.510.261.954**	**Sekretaris Kecamatan Pangkalbalam**	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca-naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan Pangkal Balam yang dilaksanakan (Dengan Satuan:%)**	**100**	**100**	**10.000.000**	**100**	**10.000.000**	**100**	**10.000.000**	**100**	**30.000.000**	**Kasi Pembangunan**	
		7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	3	30.000.000	Kasi Pembangunan	Kecamatan Pangkalbalam
		7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan Pangkal Balam (Dengan Satuan:%)**	**100**	**100**	**454.925.090**	**100**	**454.925.090**	**100**	**450.411.774**	**100**	**1.360.261.954**	**Kasi Pelayanan Umum**	
				Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja perangkat daerah yang ada di Kelurahan (Dengan Satuan:%)	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**-**	
		7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	3	30.000.000	Kasi Pelayanan Umum	Kecamatan Pangkalbalam
		7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	5	5	444.925.090	5	444.925.090	5	440.411.774	15	1.330.261.954	-	Kelurahan Pasir Garam,Kelurahan Lontong Pancur,Kelurahan Ketapang,Kelurahan Ampui,Kelurahan Rejosari

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca-naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat Pangkal Balam yang dilaksanakan (Dengan Satuan:%)**	**100**	**100**	**40.000.000**	**100**	**40.000.000**	**100**	**40.000.000**	**100**	**120.000.000**	**Kasi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum**	
		7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Dengan Satuan:Laporan)	2	2	40.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	6	120.000.000	Kasi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Pangkalbalam
		7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Keluhan Masyarakat yang Ditindaklanjuti di Kecamatan Pangkal Balam (Dengan Satuan:%)**	**100**	**100**	**10.000.000**	**100**	**10.000.000**	**100**	**10.000.000**	**100**	**30.000.000**	**Sekretaris Kecamatan Pangkalbalam**	
		7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan (Dengan Satuan:%)**	**100**	**100**	**10.000.000**	**100**	**10.000.000**	**100**	**10.000.000**	**100**	**30.000.000**	**Kasi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum**	
		7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	3	30.000.000	Kasi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Pangkalbalam
					TOTAL:		**9.173.364.417**		**9.315.302.646**		**9.425.289.330**		**27.913.956.393**		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca-naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)

CAMAT
PANGKALBALAM KOTA
PANGKALPINANG

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
KECAMATAN PANGKALBALAM

Purnamawan, S.E.

NIP 196905031993031007

Dipindai dengan CamScanner

Tabel 6.1(b)
Rencana Program, Kegiatan Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah
Sampai Tingkat Kelurahan di Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang

Tujuan Kota	Sasaran Kota	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formula/ Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Penanggung Jawab
									Tahun 2021/ 2022	2024		2025		2026				
										Kiner ja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		15
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Baik Menuju Tercapainya Good Governance						INDEKS REFORMASI BIROKRASI		Nilai	62,78	67,71		69,36		71,00		71,00		KEPALA DAERAH
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT					INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT		Nilai	NN	84		85		86		86		KEPALA DAERAH
		Meningkatkan Kepuasan masyarakat atas Pelayanan Kecamatan Pangkalbalam				Indek Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan Pangkalbalam	Mengacu Kepada Permenpan RB No 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Nilai	0	88,30		88,50		89,00		89,00		CAMAT PANGKAL BALAM

Tujuan Kota	Sasaran Kota	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formula/ Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Penanggung Jawab
									Tahun 2021/ 2022	2024		2025		2026				
										Kiner ja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		15
			Terselenggaranya pelayanan publik di kecamatan Pangkalbalam			Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan PangkalBalam	Jumlah surat keterangan atau rekomendasi dan lain-lain yang dikeluarkan oleh kecamatan tahun berkenaan/jumlah permintaan surat keterangan atau surat rekomendasi dan lain-lain dari masyarakat yang diterima tahun berkenaan x 100%	%	100	100		100		100		100		CAMAT PANGKAL BALAM
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan prima internal dan perangkat daerah	1. Nilai SAKIP Kecamatan Pangkalbalam	Nilai SAKIP Kecamatan Pangkalbalam hasil penilaian APIP	Nilai	66,11	68,00	5.776.243.951	70,00	5.918.182.180	71,00	5.955.182.180	71,00	17.649.608.311	SEKRETARIS
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya penyampaian dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja perangkat daerah tepat waktu	Persentase penyampaian dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja perangkat daerah tepat waktu	Jumlah dokumen Perencanaan, penganggaran dan Kinerja yang disusun tepat waktu tahun berkenaan DIBAGI Jumlah seluruh dokumen Perencanaan, penganggaran dan Kinerja yang disusun tahun berkenaan x 100%	%	100	100	950.000	100	950.000	100	950.000	100	2.850.000	Kasubbag PEP Dan Keuangan
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	250.000	2	250.000	2	250.000	6	750.000	Kasubbag PEP Dan Keuangan

Tujuan Kota	Sasaran Kota	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formula/ Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Penanggung Jawab
									Tahun 2021/ 2022	2024		2025		2026				
										Kiner ja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		15
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokume n	2	2	150.000	2	150.000	2	150.000	6	450.000	Kasubbag PEP Dan Keuangan
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokume n	2	2	150.000	2	150.000	2	150.000	6	450.000	Kasubbag PEP Dan Keuangan
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	4	4	150.000	4	150.000	4	150.000	12	450.000	Kasubbag PEP Dan Keuangan
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	3	3	250.000	3	250.000	3	250.000	9	750.000	Kasubbag PEP Dan Keuangan

Tujuan Kota	Sasaran Kota	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formula/ Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Penanggung Jawab
									Tahun 2021/ 2022	2024		2025		2026				
										Kiner ja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		15
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah sesuai SAP**	**Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat daerah sesuai SAP**	**Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun sesuai SAP tahun berkenaan DIBAGI jumlah seluruh laporan keuangan yang disusun tahun berkenaan x 100%**	**%**	**100**	**100**	**4.877.829.151**	**100**	**4.880.767.380**	**100**	**4.880.767.380**	**100**	**14.639.363.911**	**Kasubbag PEP Dan Keuangan**
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	41	41	4.877.529.151	41	4.880.467.380	41	4.880.467.380	41	14.638.463.911	Kasubbag PEP Dan Keuangan
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	laporan	2	2	150.000	2	150.000	2	150.000	6	450.000	Kasubbag PEP Dan Keuangan

Tujuan Kota	Sasaran Kota	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formula/ Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Penanggung Jawab
									Tahun 2021/ 2022	2024		2025		2026				
										Kiner ja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		15
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	1	1	150.000	1	150.000	1	150.000	3	450.000	Kasubbag PEP Dan Keuangan
						2. Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Kecamatan Pangkalbalam	**Indeks kepuasan pelayanan internal dengan metode survey**	**Nilai**	**3,6**	**3,65**		**3,70**		**3,75**		**3,75**		**SEKRETARIS**
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Menurunnya pelanggaran disiplin pegawai perangkat daerah**	**Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN**	**Jumlah pelanggaran disiplin ASN tahun berkenaan dikurangi jumlah pelangggaran disiplin ASN tahun lalu dibagi Jumlah pelanggaran disiplin ASN tahun lalu x 100 %**	**%**	**NN**	**0**	**27.500.000**	**0**	**32.500.000**	**0**	**32.500.000**	**0**	**92.500.000**	**Kasubbag Umum dan Kepegawaian**
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan-nya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	1	17.500.000	1	17.500.000	1	17.500.000	3	52.500.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Tujuan Kota	Sasaran Kota	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formula/ Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Penanggung Jawab
									Tahun 2021/ 2022	2024		2025		2026				
										Kiner ja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		15
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	0	2	10.000.000	3	15.000.000	3	15.000.000	8	40.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat Daerah**	**Jumlah Sub Kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang tercantum dalam APBD tahun berkenaan dibagi Jumlah Sub Kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang direncanakan dalam renja tahun berkenaan x 100%**	**%**	**100**	**100**	**178.000.000**	**100**	**178.000.000**	**100**	**178.000.000**	**100**	**534.000.000**	**Kasubbag Umum dan Kepegawaian**
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	1	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	3	45.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	6	75.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	0	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	6	15.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Tujuan Kota	Sasaran Kota	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formula/ Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Penanggung Jawab
									Tahun 2021/ 2022	2024		2025		2026				
										Kiner ja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		15
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	12	150.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2	35.000.000	2	35.000.000	2	35.000.000	6	105.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	0	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	3	9.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	1	1	45.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000	3	135.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Terlaksananya pengadaan barang milik perangkat daerah**	**Persentase pengadaan barang milik perangkat daerah**	**Jumlah pengadaan barang milik daerah yang terealisasi tahun berkenaan (unit) dibagi Jumlah pengadaan barang milik daerah yang direncanakan dalam renja tahun berkenaan (unit) x 100%**	**%**	**100**	**100**	**-**	**100**	**134.000.000**	**100**	**171.000.000**	**100**	**305.000.000**	**Kasubbag Umum dan Kepegawaian**

Tujuan Kota	Sasaran Kota	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formula/ Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Penanggung Jawab
									Tahun 2021/ 2022	2024		2025		2026				
										Kiner ja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		15
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	0	0	0	2	44.000.000	3	66.000.000	5	110.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
				Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah unit Mebel yang Disediakan	Jumlah unit Mebel yang Disediakan	unit	0	0	0	1	0	0	15.000.000	1	15.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	0	0	0	1	50.000.000	1	50.000.000	2	100.000.000	Kasi Pembangunan
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	0	0	0	1	40.000.000	1	40.000.000	2	80.000.000	Kasi Pembangunan

Tujuan Kota	Sasaran Kota	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formula/ Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Penanggung Jawab
									Tahun 2021/ 2022	2024		2025		2026				
										Kiner ja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		15
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Sub Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tercantum dalam APBD tahun berkenaan dibagi Jumlah Sub Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah direncanakan dalam Renja Tahun berkenaan x 100%**	**%**	**100**	**100**	**601.964.800**	**100**	**601.964.800**	**100**	**601.964.800**	**100**	**1.805.894.400**	**Kasubbag Umum dan Kepegawaian**
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	3	105.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	3	120.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	526.964.800	1	526.964.800	1	526.964.800	3	1.580.894.400	Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Tujuan Kota	Sasaran Kota	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formula/ Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Penanggung Jawab
									Tahun 2021/ 2022	2024		2025		2026				
										Kiner ja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		15
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terpeliharanya barang milik perangkat daerah**	**Persentase barang milik perangkat daerah dalam kondisi baik**	**Jumlah barang milik perangkat daerah yang terpelihara dengan baik tahun berkenaan (unit) dibagi jumlah seluruh barang milik perangkat daerah yang ada tahun berkenaan (unit) x 100%**	**%**	**100**	**100**	**90.000.000**	**100**	**90.000.000**	**100**	**90.000.000**	**100**	**270.000.000**	**Kasubbag Umum dan Kepegawaian**
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	3	3	65.000.000	3	65.000.000	3	65.000.000	3	195.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/RehabilitasiGedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnyayang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnyayang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit	1	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	75.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Tujuan Kota	Sasaran Kota	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formula/ Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Penanggung Jawab
									Tahun 2021/ 2022	2024		2025		2026				
										Kiner ja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		15
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terselenggaranya Urusan pemerintahan Umum di Kecamatan Pangkal Balam	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Di Kecamatan Pangkal Balam	Jumlah kegiatan penyelenggaraan kegiatan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan tahun berkenaan dibagi Jumlah kegiatan penyelenggaraan kegiatan urusan pemerintahan umum yang direncanakan dalam Renja Tahun berkenaan x 100%	%	100	100	167.500.000	100	167.500.000	100	167.500.000	100	502.500.000	SEKRETARIS
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Pangkal Balam sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase penyelenggaraan kegiatan urusan pemerintahan di Kecamatan Pangkal Balam penugasan kepala Daerah dalam rangka pemberdayaan masyarakat	Jumlah sub kegiatan penyelenggaraan kegiatan urusan pemerintahan penugasan kepala daerah dalam rangka pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan tahun berkenaan dibagi Jumlah sub kegiatan penyelenggaraan kegiatan urusan pemerintahan penugasan kepala daerah yang direncanakan dalam Renja Tahun berkenaan x 100%	%	100	100	160.000.000	100	160.000.000	100	160.000.000	100	480.000.000	Kasi Pemberdayaan masyarakat

Tujuan Kota	Sasaran Kota	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formula/ Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Penanggung Jawab
									Tahun 2021/ 2022	2024		2025		2026				
										Kiner ja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		15
				Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Dokume n	1	1	160.000.000	1	160.000.000	1	160.000.000	3	480.000.000	Kasi Pemberdaya an masyarakat
						Persentase penyelenggar aan kegiatan urusan pemerintahan di Kecamatan Pangkal Balam penugasan kepala Daerah dalam rangka koordinasi pimpinan	**Jumlah sub kegiatan penyelenggaraan kegiatan urusan pemerintahan penugasan kepala daerah dalam rangka koordinasi pimpinan yang dilaksanakan tahun berkenaan dibagi Jumlah sub kegiatan penyelenggaraan kegiatan urusan pemerintahan penugasan kepala daerah yang direncanakan dalam Renja Tahun berkenaan x 100%**	**%**	**0**	**100**	**7.500.000**	**100**	**7.500.000**	**100**	**7.500.000**	**100**	**22.500.000**	**Kasi Tata Pemerintah an, Ketentrama n dan Ketertiban Umum**
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Pangkalbalam	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Pangkalbalam	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Pangkalbalam	Dokume n	0	1	7.500.000	1	7.500.000	1	7.500.000	3	22.500.000	Kasi Tata Pemerintaha n, Ketentraman dan Ketertiban Umum

Tujuan Kota	Sasaran Kota	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formula/ Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Penanggung Jawab
									Tahun 2021/ 2022	2024		2025		2026				
										Kiner ja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		15
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**1. Meningkatnya sarana dan prasarana publik yang terbangun di Kecamatan Pangkal Balam**	**Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun di Kecamatan Pangkal Balam**	**Jumlah sarana dan prasarana publik yang dibangun (unit) tahun berkenaan dibagi Jumlah sarana prasarana publik yang akan dibangun tahun berkenaan x 100%**	**%**	**0**	**75**	**2.714.695.376**	**80**	**2.714.695.376**	**90**	**2.792.195.376**	**90**	**8.221.586.128**	**SEKRETARIS**
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**1.1 Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kecamatan Pangkal Balam**	**Persentase penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan kelurahan di Kecamatan Pangkal Balam**	**Jumlah kegiatan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan pada tahun berkenaan dibagi jumlah kegiatan yang direncanakan dalam RENJA tahun berkenaan x 100**	**%**	**100**	**100**	**25.000.000**	**100**	**25.000.000**	**100**	**25.000.000**	**100**	**75.000.000**	**Kasi Pembangunan**
-				Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	6	6	15.000.000	6	15.000.000	6	15.000.000	18	45.000.000	Kasi Pembangunan
				Evaluasi Kelurahan	Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan	5	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	15	30.000.000	Kasi Pembangunan

Tujuan Kota	Sasaran Kota	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formula/ Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Penanggung Jawab
									Tahun 2021/ 2022	2024		2025		2026				
										Kiner ja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		15
					1.2. Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Pasir Garam	**Persentase penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan kelurahan Pasir Garam**	**Jumlah kegiatan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan pada tahun berkenaan dibagi jumlah kegiatan yang direncanakan dalam RENJA tahun berkenaan x 100**	**%**	**0**	**100**	**24.500.000**	**100**	**24.500.000**	**100**	**40.000.000**	**100**	**89.000.000**	**Lurah Pasir Garam**
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan Pasir Garam	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Pasir Garam yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Pasir Garam yang Terbangun	Unit	0	1	24.500.000	1	24.500.000	1	40.000.000	3	89.000.000	Lurah Pasir Garam
					1.3 Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Ketapang	**Persentase penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan kelurahan Ketapang**	**Jumlah kegiatan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan pada tahun berkenaan dibagi jumlah kegiatan yang direncanakan dalam RENJA tahun berkenaan x 100**	**%**	**0**	**100**	**24.500.000**	**100**	**24.500.000**	**100**	**40.000.000**	**100**	**89.000.000**	**Lurah Ketapang**
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan Ketapang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Ketapang yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Ketapang yang Terbangun	Unit	0	1	24.500.000	1	24.500.000	1	40.000.000	3	89.000.000	Lurah Ketapang

Tujuan Kota	Sasaran Kota	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formula/ Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Penanggung Jawab
									Tahun 2021/ 2022	2024		2025		2026				
										Kiner ja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		15
					1.4 Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Ampui	**Persentase penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan kelurahan Ampui**	**Jumlah kegiatan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan pada tahun berkenaan dibagi jumlah kegiatan yang direncanakan dalam RENJA tahun berkenaan x 100**	**%**	**0**	**100**	**24.500.000**	**100**	**24.500.000**	**100**	**40.000.000**	**100**	**89.000.000**	**Lurah Ampui**
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan Ampui	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Ampui yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Ampui yang Terbangun	Unit	0	1	24.500.000	1	24.500.000	1	40.000.000	3	89.000.000	Lurah Ampui
					1.5 Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Rejosari	**Persentase penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan kelurahan Rejosari**	**Jumlah kegiatan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan pada tahun berkenaan dibagi jumlah kegiatan yang direncanakan dalam RENJA tahun berkenaan x 100**	**%**	**0**	**100**	**24.500.000**	**100**	**24.500.000**	**100**	**40.000.000**	**100**	**89.000.000**	**Lurah Rejosari**
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan Rejosari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Rejosari yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Rejosari yang Terbangun	Unit	0	1	24.500.000	1	24.500.000	1	40.000.000	3	89.000.000	Lurah Rejosari

Tujuan Kota	Sasaran Kota	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formula/ Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Penanggung Jawab
									Tahun 2021/ 2022	2024		2025		2026				
										Kiner ja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		15
					1.6 Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Lontong Pancur	Persentase penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan kelurahan Lontong Pancur	Jumlah kegiatan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan pada tahun berkenaan dibagi jumlah kegiatan yang direncanakan dalam RENJA tahun berkenaan x 100	%	0	100	24.500.000	100	24.500.000	100	40.000.000	100	89.000.000	Lurah Lontong Pancur
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan Lontong Pancur	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Lontong Pancur yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Lontong Pancur yang Terbangun	Unit	0	1	24.500.000	1	24.500.000	1	40.000.000	3	89.000.000	Lurah Lontong Pancur
					2. Terpenuhinya Lembaga Kemasyarakatan yang aktif di Kecamatan Pangkal Balam	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif di Kecamatan Pangkal Balam	Jumlah lembaga kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan yang akitf / Jumlah seluruh lembaga kemasyarakata di kecamatan dan kelurahan x 100 %	%	100	100,00		100,00		100,00		100,00		SEKRETARIS
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	2.1 Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan di Kecamatan Pangkal Balam	Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakat tingkat kecamatan yang dilaksanakan di Kecamatan Pangkal Balam	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan tahun berkenaan dibagi kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan dalam renja tahun berkenaan x 100	%	100	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	150.000.000	Kasi Pemberdayaan masyarakat

Tujuan Kota	Sasaran Kota	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formula/ Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Penanggung Jawab
									Tahun 2021/ 2022	2024		2025		2026				
										Kiner ja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		15
				Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakat-an	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dikelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dikelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	0	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	6	150.000.000	Kasi Pemberdayaan masyarakat
					2.2 Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Pasir Garam	**Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakat yang dilaksanakan di Kelurahan Pasir Garam**	**Jumlah pelaksanaan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan tahun berkenaan dibagi kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan dalam renja tahun berkenaan x 100**	**%**	**0**	**100**	**464.737.600**	**100**	**464.737.600**	**100**	**464.737.600**	**100**	**1.394.212.800**	**Lurah Pasir Garam**
				Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakat-an	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan Dikelurahan Pasir Garam	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Pasir Garam	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Pasir Garam	Lembaga Kemasyarakatan	6	6	464.737.600	6	464.737.600	6	464.737.600	6	1.394.212.800	Lurah Pasir Garam
					2.3 Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Ketapang	**Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakat yang dilaksanakan di Kelurahan Ketapang**	**Jumlah pelaksanaan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan tahun berkenaan dibagi kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan dalam renja tahun berkenaan x 100**	**%**	**0**	**100**	**528.393.776**	**100**	**528.393.776**	**100**	**528.393.776**	**100**	**1.585.181.328**	**Lurah Ketapang**

Tujuan Kota	Sasaran Kota	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formula/ Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Penanggung Jawab
									Tahun 2021/ 2022	2024		2025		2026				
										Kiner ja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		15
				Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakat-an	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan Dikelurahan Ketapang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Ketapang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Ketapang	Lembaga Kemasyarakatan	6	6	528.393.776	6	528.393.776	6	528.393.776	6	1.585.181.328	Lurah Ketapang
					2.4 Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Ampui	**Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakat yang dilaksanakan di Kelurahan Ampui**	**Jumlah pelaksanaan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan tahun berkenaan dibagi kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan dalam renja tahun berkenaan x 100**	**%**	**0**	**100**	**435.288.000**	**100**	**435.288.000**	**100**	**435.288.000**	**100**	**1.305.864.000**	**Lurah Ampui**
				Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakat-an	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan Dikelurahan Ampui	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Ampui	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Ampui	Lembaga Kemasyarakatan	6	6	435.288.000	6	435.288.000	6	435.288.000	6	1.305.864.000	Lurah Ampui
					2.5 Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Rejosari	**Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakat yang dilaksanakan di Kelurahan Rejosari**	**Jumlah pelaksanaan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan tahun berkenaan dibagi kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan dalam renja tahun berkenaan x 100**	**%**	**0**	**100**	**590.688.000**	**100**	**590.688.000**	**100**	**590.688.000**	**100**	**1.772.064.000**	**Lurah Rejosari**

Tujuan Kota	Sasaran Kota	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formula/ Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Penanggung Jawab
									Tahun 2021/ 2022	2024		2025		2026				
										Kiner ja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		15
				Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakat-an	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan Dikelurahan Rejosari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Rejosari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Rejosari	Lembaga Kemasyarakatan	6	6	590.688.000	6	590.688.000	6	590.688.000	6	1.772.064.000	Lurah Rejosari
					2.6 Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Lontong Pancur	**Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakat yang dilaksanakan di Kelurahan Lontong Pancur**	**Jumlah pelaksanaan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan tahun berkenaan dibagi kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan dalam renja tahun berkenaan x 100**	**%**	**0**	**100**	**498.088.000**	**100**	**498.088.000**	**100**	**498.088.000**	**100**	**1.494.264.000**	**Lurah Rejosari**
				Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakat-an	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan Dikelurahan Lontong Pancur	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Lontong Pancur	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Lontong Pancur	Lembaga Kemasyarakatan	6	6	498.088.000	6	498.088.000	6	498.088.000	6	1.494.264.000	Lurah Lontong Pancur
			Terselesainya permasalahan dan pengaduan masyarakat di kecamatan Pangkalbalam			**Persentase permasalahan dan pengaduan masyarakat yang ditangani di Kecamatan Pangkal Balam**	**Jumlah permasalahan di masyarakat yang ditindaklanjuti tahun berkenaan dibagi Jumlah permasalahan atau laporan pengaduan masyarakat yang terjadi tahun berkenaan x 100%**	**%**	**0**	**100**		**100**		**100**		**100**		**CAMAT PANGKAL BALAM**

Tujuan Kota	Sasaran Kota	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formula/ Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Penanggung Jawab
									Tahun 2021/ 2022	2024		2025		2026				
										Kiner ja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		15
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya waktu pelayanan administrasi tepat waktu di Kecamatan Pangkal Balam	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu di Kecamatan Pangkal Balam	Jumlah surat keluar dari PATEN yang dikeluarkan tepat waktu sesuai SOP Tahun berkenaan / Jumlah seluruh surat keluar yang dikeluarkan PATEN tahun berkenaan x 100%	%	100	100,00	504.925.090	100,00	504.925.090	100,00	500.411.774	100,00	1.510.261.954	SEKRETARIS
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.1 Terselenggaranya koordinasi kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan Pangkal Balam	Persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan Pangkal Balam yang dilaksanakan	Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang dilaksanakan tahun berkenaan dibagi koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang direncanakan tahun berkenaan x 100	%	100	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	30.000.000	Kasi Pembangunan
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Pangkalbalam	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Pangkalbalam	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Pangkalbalam	Dokumen	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	3	30.000.000	Kasi Pembangunan

Tujuan Kota	Sasaran Kota	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formula/ Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Penanggung Jawab
									Tahun 2021/ 2022	2024		2025		2026				
										Kiner ja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		15
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	**2.1 Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Pangkal Balam**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan Pangkal Balam**	**Jumlah urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan yang dilaksanakan tahun berkenaan dibagi jumlah urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan yang direncanakan tahun berkenaan x 100**	**%**	**100**	**100**	**10.000.000**	**100**	**10.000.000**	**100**	**10.000.000**	**100**	**30.000.000**	**Kasi Pelayanan Umum**
				Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Pangkalbalam	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Pangkalbalam	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Pangkalbalam	Laporan	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	3	30.000.000	Kasi Pelayanan Umum

Tujuan Kota	Sasaran Kota	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formula/ Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Penanggung Jawab
									Tahun 2021/ 2022	2024		2025		2026				
										Kiner ja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		15
					2.2 Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Pasir Garam	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja perangkat daerah yang ada di Kelurahan Pasir Garam**	**Jumlah urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kelurahan yang dilaksanakan tahun berkenaan dibagi jumlah urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kelurahan yang direncanakan tahun berkenaan x 100**	**%**	**100**	**100**	**90.291.172**	**100**	**90.291.172**	**100**	**89.388.509**	**100**	**269.970.853**	**Lurah Pasir Garam**
				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pangkalbalam Kelurahan Pasir Garam	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan kelurahan Pasir garam	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan kelurahan Pasir garam	Laporan	1	1	90.291.172	1	90.291.172	1	89.388.509	3	269.970.853	Lurah Pasir Garam

Tujuan Kota	Sasaran Kota	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formula/ Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Penanggung Jawab
									Tahun 2021/ 2022	2024		2025		2026				
										Kiner ja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		15
					2.3 Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Ketapang	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja perangkat daerah yang ada di Kelurahan Ketapang**	**Jumlah urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kelurahan yang dilaksanakan tahun berkenaan dibagi jumlah urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kelurahan yang direncanakan tahun berkenaan x 100**	**%**	**100**	**100**	**88.790.592**	**100**	**88.790.592**	**100**	**87.887.929**	**100**	**265.469.113**	**Lurah Ketapang**
				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pangkalbalam Kelurahan Ketapang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pangkalbalam kelurahan Ketapang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pangkalbalam kelurahan Ketapang	Laporan	1	1	88.790.592	1	88.790.592	1	87.887.929	3	265.469.113	Lurah Ketapang

Tujuan Kota	Sasaran Kota	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formula/ Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Penanggung Jawab
									Tahun 2021/ 2022	2024		2025		2026				
										Kiner ja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		15
					2.4 Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Ampui	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja perangkat daerah yang ada di Kelurahan Ampui**	**Jumlah urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kelurahan yang dilaksanakan tahun berkenaan dibagi jumlah urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kelurahan yang direncanakan tahun berkenaan x 100**	**%**	**100**	**100**	**92.048.592**	**100**	**92.048.592**	**100**	**91.145.929**	**100**	**275.243.113**	**Lurah Ampui**
				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pangkalbalam Kelurahan Ampui	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pangkalbalam kelurahan Ampui	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pangkalbalam kelurahan Ampui	Laporan	1	1	92.048.592	1	92.048.592	1	91.145.929	3	275.243.113	Lurah Ampui

Tujuan Kota	Sasaran Kota	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formula/ Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Penanggung Jawab
									Tahun 2021/ 2022	2024		2025		2026				
										Kiner ja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		15
					2.5 Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Rejosari	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja perangkat daerah yang ada di Kelurahan Rejosari yang dilaksanakan**	**Jumlah urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kelurahan yang dilaksanakan tahun berkenaan dibagi jumlah urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kelurahan yang direncanakan tahun berkenaan x 100**	**%**	**100**	**100**	**86.391.842**	**100**	**86.391.842**	**100**	**85.489.179**	**100**	**258.272.863**	**Lurah Rejosari**
				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pangkalbalam Kelurahan Rejosari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pangkalbalam kelurahan Rejosari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pangkalbalam kelurahan Rejosari	Laporan	1	1	86.391.842	1	86.391.842	1	85.489.179	3	258.272.863	Lurah Rejosari

Tujuan Kota	Sasaran Kota	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formula/ Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Penanggung Jawab
									Tahun 2021/ 2022	2024		2025		2026				
										Kiner ja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		15
					2.6 Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Lontong Pancur	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja perangkat daerah yang ada di Kelurahan Lontong Pancur yang dilaksanakan**	**Jumlah urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kelurahan yang dilaksanakan tahun berkenaan dibagi jumlah urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kelurahan yang direncanakan tahun berkenaan x 100**	**%**	**100**	**100**	**87.402.892**	**100**	**87.402.892**	**100**	**86.500.229**	**100**	**261.306.013**	**Lurah Lontong Pancur**
				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pangkalbalam Kelurahan Lontong Pancur	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pangkalbalam kelurahan Lontong Pancur	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pangkalbalam kelurahan Lontong Pancur	Laporan	1	1	87.402.892	1	87.402.892	1	86.500.229	3	261.306.013	Lurah Lontong Pancur
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**3.1 Terselenggaranya Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat Pangkal Balam**	**Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat Pangkal Balam yang dilaksanakan**	**Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat Pangkal Balam yang dilaksanakan**	**%**	**100**	**100**	**40.000.000**	**100**	**40.000.000**	**100**	**40.000.000**	**100**	**120.000.000**	**Kasi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Tujuan Kota	Sasaran Kota	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formula/ Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Penanggung Jawab
									Tahun 2021/ 2022	2024		2025		2026				
										Kiner ja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		15
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	laporan	2	2	40.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	6	120.000.000	Kasi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Terlaksananya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Pangkal Balam**	**Persentase Keluhan Masyarakat yang Ditindaklanjuti di Kecamatan Pangkal Balam**	**Jumlah Laporan atau Pengaduan dari Masyarakat yang Ditindaklanjuti Tahun berkenaan / Jumlah Laporan Atau Pengaduan yang Diterma Tahun Berkenaan x 100 %**	**%**	**100**	**100,00**	**10.000.000**	**100,00**	**10.000.000**	**100,00**	**10.000.000**	**100,00**	**30.000.000**	**SEKRETARIS**
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan**	**Jumlah koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum tahun berkenaan dibagi jumlah koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang direncanakan tahun berkenaan x 100**	**%**	**100**	**100**	**10.000.000**	**100**	**10.000.000**	**100**	**10.000.000**	**100**	**30.000.000**	**Kasi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Tujuan Kota	Sasaran Kota	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formula/ Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Penanggung Jawab
									Tahun 2021/ 2022	2024		2025		2026				
										Kiner ja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		15
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Pangkalbalam	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Pangkalbalam	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Pangkalbalam	Laporan	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	3	30.000.000	Kasi Tata Pemerintah-an, Ketentraman dan Ketertiban Umum
				TOTAL							**9.173.364.417,00**		**9.315.302.646,00**		**9.425.289.330,00**		**27.913.956.393,00**	

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Kecamatan Pangkalbalam adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kecamatan Pangkalbalam dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026. Target indikator kinerja Kecamatan Pangkalbalam yang mengacu pada tujuan dan sasaran Kota ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Kecamatan Pangkalbalam selama tiga tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Kecamatan Pangkalbalam

Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan ini ditampilkan dalam Tabel sebagai berikut:

Tabel 7

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pangkalbalam

Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun			Target akhir Renstra
		2021	2024	2025	2026	
Persentase penyelenggaraan pemeritahan kecamatan Pangkalbalam	%	100	100	100	100	100
Persentase permasalahan dan pengaduan masyarakat yang ditangani	%	NA	100	100	100	100

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Penyelenggaraan Kecamatan Pangkalbalam yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2024-2026

No	Tujuan RPD/Renstra	Sasaran RPD/Renstra	Program	Sasaran Program	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Kinerja			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD/ Renstra
							2021	2024	2025	2026	
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Baik Menuju Tercapainya Good Governance				INDEKS REFORMASI BIROKRASI	Nilai	**62,78**	**67,71**	**69,36**	**71,00**	**71,00**
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT			INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	Nilai	**NA**	**84**	**85**	**86**	**86**

No	Tujuan RPD/Renstra	Sasaran RPD/Renstra	Program	Sasaran Program	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Kinerja			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD/ Renstra
							2021	2024	2025	2026	
	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan kecamatan Pangkalbalam				**Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan Pangkalbalam**	**Nilai**	**NA**	**88,30**	**88,50**	**90,00**	**90,00**
A		**Sasaran 1 : Terselenggaranya pelayanan publik di kecamatan Pangkalbalam**			**Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan PangkalBalam**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
1			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan prima internal dan perangkat daerah**	**1. Nilai SAKIP Kecamatan Pangkalbalam**	**Nilai**	**66,11**	**68,00**	**70,00**	**71,00**	**71,00**
2			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Terselenggaranya Urusan pemerintahan Umum di Kecamatan Pangkal Balam**	**Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Di Kecamatan Pangkal Balam**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100,00**
3			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**1. Meningkatnya sarana dan prasarana publik yang terbangun di Kecamatan Pangkal Balam**	**Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun di Kecamatan Pangkal Balam**	**%**	**0**	**75,00**	**80,00**	**90,00**	**90,00**

No	Tujuan RPD/Renstra	Sasaran RPD/Renstra	Program	Sasaran Program	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Kinerja			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD/ Renstra
							2021	2024	2025	2026	
				2. Terpenuhinya Lembaga Kemasyarakatan yang aktif di Kecamatan Pangkal Balam	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif di Kecamatan Pangkal Balam	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00
		Terselesainya permasalahan dan pengaduan masyarakat di kecamatan Pangkalbalam			Persentase permasalahan dan pengaduan masyarakat yang ditangani di Kecamatan Pangkal Balam	%	0	100	100	100	100,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya waktu pelayanan administrasi tepat waktu di Kecamatan Pangkal Balam	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu di Kecamatan Pangkal Balam	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terlaksananya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Pangkal Balam	Persentase Keluhan Masyarakat yang Ditindaklanjuti di Kecamatan Pangkal Balam	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00

BAB VIII
PENUTUP

8.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pangkalbalam Tahun 2024-2026 adalah selama tiga tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2024-2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Pangkalbalam, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kota Pangkalpinang Tahun 2005 - 2025.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pangkalbalam tahun 2024-2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang Kecamatan Pangkalbalam agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Kecamatan Pangkalbalam dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pangkalbalam yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2024 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Kecamatan Pangkalbalam sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.